

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses kearah yang lebih baik, yang dapat memberikan perbedaan dan keadaan sebelumnya. Hal ini senantiasa menjadikan suatu acuan pada pemerintah di banyak Negara yang makin mendambakan tingkat kehidupan agar lebih baik, khususnya dinegara Indonesia. Karena pembangunan harus dapat menciptakan perubahan-perubahan di masyarakat. Sebagai usaha yang direncanakan pembangunan tidak akan terlepas dari adanya intervensi aktif yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan di masyarakat.

Pembangunan nasioanal dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa tujuan Negara “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Bertambahnya jumlah penduduk sejalan dengan bertambahnya kebutuhan akan listrik yang menyebabkan adanya krisis sumber daya listrik di Jawa Tengah yang terjadi pada tahun 2017. Krisis sumber daya listrik tersebut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu pemerinah berusaha untuk memenuhi

kebutuhan publik dengan membangun pembangkit listrik. Pembangunan tenaga listrik diharapkan mampu memberikan dampak yang positif untuk masyarakat dan pembangunan tenaga listrik tersebut diharapkan dapat disalurkan secara merata sampai ke plosok desa. Dibangunnya pembangkit listrik di Kabupaten Batang diharapkan dapat mensuplai kebutuhan listrik rumah tangga dan industri di Jawa Tengah. Pembangunan pembangkit listrik diharapkan agar dapat dinikmati oleh setiap orang secara merata. Oleh dan karna itu dibangunlah pembangkit listrik nasional yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang.

Kabupaten Batang meupakan daerah potensial untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. Terpilihnya Kabupaten Batang sebagai lokasi pembangunan melalui seleksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah telah dilakukan survey di tiga kabupaten, yakni Kendal, Batang, dan Pemasang sebagai calon lokasi pembangunan PLTU serta disampaikan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi tersebut. Setelah dilakukan survey dari tiga lokasi tersebut, kabupaten Batang menjadi lokasi yang paling cocok untuk melakukan pembangunan PLTU karena di Batang terdapat lahan milik PTP sehingga proses pembebasan lahan akan lebih mudah. Selain itu, dipilihnya Batang karena garis pantainya stabil serta kedalaman lautnya mencukupi untuk pembangunan pelabuhan sebagai sarana pemasok bahan baku batubara. Sementara untuk Kendal dan Pemasang, calon lokasi hampir seluruhnya milik masyarakat sehingga akan mempersulit pembebasan lahan (jateng.antaranews.com).

Sebagai mana yang dijelaskan pasal diatas PT Bhimasena menilai lokasi Desa Karangeneng, Ponowareng dan Ujungnegoro paling memenuhi syarat kriteria dari beberapa lokasi yang telah dikaji sepanjang wilayah pantura untuk dibangun PLTU. Setelah dilakukan pengkajian mendalam terhadap lokasi potensial PLTU serta didukung beberapa penelitian teknis, seperti uji boring tanah, topographic test, environmental scoping, dan study. Disimpulkan bahwa Desa Karanggeneng merupakan lokasi yang paling sesuai dengan perencanaan pembangunan PLTU (jateng.antaranews.com).

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dibangun diharapkan dapat mensuplai kebutuhan listrik rumah tangga dan industri di Jawa Tengah. Tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 M² pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1000 MW di Kab. Batang Prov Jawa Tengah. Pembangunan PLTU, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, ataupun perluasan peluang kerja terutama masyarakat di Kabupaten Batang.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang merupakan salah satu proyek terbesar yang sedang dikerjakan pemerintah dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini. Proyek ini merupakan proyek Showcase KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari Rp 30 Triliun sekaligus proyek KPS pertama yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 tentang

kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Adapun sumber berita yang penulis lansir dari berita Nasional yaitu:

market.bisnis.com: BPI ditetapkan sebagai perusahaan konsorsium¹ yang memenangkan lelang proyek PLTU Batng. Kepemilikannya terdiri dari Adaro Energy sebesar 34%, J-Power 34%, dan Itochu 32%. Proyek dengan investasi senilai US\$ 4,5 miliar setara dengan Rp 60,06 triliun (kurs Rp 13.347 per dolar Amerika Serikat), itu bakal didanai dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Secara keseluruhan proyek PLTU Batang menggunakan lahan seluas 226 hektare. Proyek dimulai sejak 2011 itu menjadi skema kerjasama pemerintah dan swasta (*public private partnership/PPP*) terbesar untuk memenuhi megaprojek pengadaan listrik 35.000 MW. Dari megaprojek 35.000 MW tersebut PT Perusahaan

¹ Konsorsium/kon-sor-si-um/ n (1) himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama; kumpulan pedagang dan industriawan; perkongsian; (2) himpunan sarjana sebidang yang mengurus kepentingan bersama: ~ ilmu sastra (KBBI.co.id)

Listrik Negara (Persero) diproyeksikan mengambil porsi sekitar 10.000

MW.Sisasinya, sebesar 25.000 MW bakal digarap oleh swasta.

kompasiana.com: proyek yang dikelola oleh PT. Bimashena Power Indonesia (BPI) ini merupakan proyek pertama yang berhasil mengimplementasikan UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembiayaan pembangunan PLTU Batang paling besar berasal dari Bang for memastiInternasional Cooperation (JBIC) dan sisanya Bang yang terdiri atas 9 komersial. JBIC memberikan persyaratan yang ketat untuk peminjam dana pembangunan. JBI menginginkan kepastian bahwa proyek pembangunan PLTU Batang akan berjalan tanpa adanya gangguan. Sehingga, JBIC dapat memastikan uang yang dipinjamkan sebagai sumber pendanaan proyek PLTU Batang dapat kembali. Proses pengembalian dana akan dilakukan setelah proses pembangunan selesai. Pembangunan PLTU sendiri diestimasi memakan waktu 48 bulan dan akan mulai beroperasi pada tahun 2020. Setelah beroperasi, listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN dibawah perjanjian jual beli listrik atau biasa disebut *Power Purchase Agreement (PPA)* yang berlaku dalam jangka 25 tahun. Proyek ini menggunakan sistem *build-operate-transfer*. Dimana, setelah 25 tahun beroperasi, tanah dan bangunan akan sepenuhnya diserahkan kepada PT PLN. *Sistem build-operate-transfer* merupakan sistem yang menguntungkan karena tidak banyak menggunakan dana APBN maupun APBD. Proyek ini sangat membantu pemerintah dalam menyediakan barang publik berupa listrik bagi masyarakat. Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah membuat pemerintah harus bekerjasama dengan pihak swasta. Adanya sistem *build-operate-transfer* sangat efektif karena penyediaan dana berasal dari kerjasama dengan pihak kreditur yang dibangun oleh pihak swasta. Selanjutnya, listrik akan dibeli oleh PT PLN dan uang tersebut akan digunakan untuk mengembalikan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur.

Masa sekarang ini sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum. Pemerintah di dalam melakukan pembangunan untuk kepentingan umum pasti

ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dengan masyarakat setempat begitu pula pembangunan PLTU Batang. Pembangunan PLTU merupakan hal yang baru bagi masyarakat Batang. Oleh karena itu masing-masing individu akan mempunyai persepsi yang berbeda. Ada yang menerima rencana pembangunan ada juga yang menolak rencana pembangunan PLTU, dan ada pula yang bersikap biasa saja. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui dampak atau pengaruh positif dibangunnya PLTU. Ketidaktahuan masyarakat itulah yang membuat pembangunan menjadi terhambat. Seiring berjalannya waktu dan banyaknya sosialisasi yang merakyat dari pemerintah dan pihak BPI, akhirnya masyarakat dapat menerima pembangunan PLTU tersebut, yang nantinya dapat mengangkat citra Kabupaten Batang. Kesadaran masyarakat Batang akan pentingnya pembangunan PLTU Batang mulai terbuka dapat menerima dan merespon positif memperlancar pembangunan PLTU tersebut. Namun demikian ada juga sebagian masyarakat yang kontra dengan pembangunan PLTU Batang ini.

PLTU Batang membutuhkan lahan seluas 326 ha. Lahan tersebut sebanyak 226 ha akan digunakan untuk power blok dan 100 ha dipergunakan untuk pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk. Adapun untuk power blok lahan yang sudah dibebaskan mencapai 87 persen dan sisanya akan menjadi tanggung jawab PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) untuk pembebasan lahan (Antara News, Maret 2013). Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang ditargetkan beroperasi pada 2020 hingga kini belum sepenuhnya

terbebas dari masalah. Proses ganti rugi lahan masyarakat terdampak proyek pembangunan PLTU Batang itu belum sepenuhnya rampung. Meskipun Pengadilan Negeri Kabupaten Batang telah melakukan eksekusi lahan milik warga terdampak proyek pembangunan PLTU Batang melalui konsinyasi, hingga kini masih ada sekitar 74 bidang lahan yang masih bermasalah. Warga setempat bersikukuh tidak mau menerima uang ganti rugi pengambilalihan kepemilikan lahan tersebut (www.solopos.com)

Sisa lahan milik warga yang belum bisa dibebaskan dan berada pada power block tersebut hampir dipastikan selesai setelah PT PLN akan mengambil alih pembebasan lahan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dengan menerapkan undang-undang tersebut memberikan kepastian bahwa proyek PLTU akan benar-benar terwujud dan mau tidak mau warga dengan terpaksa harus menjual tanah mereka kepada pihak PLN (jateng.antarane.ws.com).

Proyek PLTU menggunakan lahan pertanian produktif dan sawah beririgrasi teknis seluas 124,5 hektar. Perkebunan melati seluas 20 hektar dan 152 sawah tadah hujan juga terancam. Pembangunan PLTU juga dibangun di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegero-Roban, kawasan konservasi kaya ikan dan terumbu karang yang menjadi wilayah tangkapan ikan bagi nelayan dari berbagai wilayah di Pantai Utara Jawa (Tempo.co). Akibat adanya masalah pembebasan lahan milik warga seluas 12,5 ha dari 226 ha yang dibutuhkan oleh PLTU itu, maka waktu pekerjaan pembangunan ketenagalistrikan terbesar se-Asia Tenggara itu menjadi molor. Kendati

demikian, proyek senilai sekitar US\$4 miliar tersebut, kini terus berjalan demi mengejar pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap ketenagalistrikan di Pulau Jawa dan Bali (www.solopos.com)

Dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2012 mengamanatkan kepada pihak yang memiliki hak atas tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hanya saja, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pelepasan hak itu tidak serta merta. Setidaknya harus ada pemberian ganti kerugian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Diperjelas pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 menjamin bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.² Dalam pembangunan PLTU masih adanya permasalahan yang belum terselesaikan yaitu permasalahan pembebasan lahan. Hingga saat ini persoalan pembebasan lahan masih belum terselesaikan, ada 74 bidang lahan yang bermasalah. Warga setempat bersikukuh tidak mau menerima uang pengganti dikarenakan PT BPI menetapkan harga jual tanah dengan harga Rp 100.000 per meter setidaknya ada sebagian warga lainnya menerima harga tanah Rp 400.000 per meter. Warga meminta keadilan kepada PT BPI dengan harga sama

² UU no. 2 th 2012 psl 1 : 10 tentang pengadaan tana bagi pembangunan untuk kepantingan umum

yaitu Rp 400.000 permeter. Adapun sumber berita yang penulis lansir dari berita

Nasional yaitu:

tempo.com, Batang - Konsinyasi³ akan menjadi langkah terakhir bagi pemerintah dalam upaya membebaskan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. "Tapi kami akan mengutamakan musyawarah dulu dengan warga," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Nasikhin, pada Kamis, 6 November 2014. Pemerintah akan menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Konsinyasi atau ganti kerugian dari pemerintah yang dititipkan ke pengadilan negeri setempat itu diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Konsinyasi berlaku bagi warga Batang yang menolak ganti kerugian sesuai hasil musyawarah. Sebelum dilakukan konsinyasi, warga berhak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri hingga kasasi⁴ ke Mahkamah Agung. Setelah ada kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung, tanah milik warga yang menolak PLTU Batang langsung dikuasai negara.

Pekan ini, PT PLN dan tim fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang akan melakukan proses validasi dan verifikasi lahan yang belum dibebaskan PT Bhimasena Power Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 13 persen lahan dari total 236 hektare lahan yang belum dibebaskan oleh investor PLTU Batang tersebut. Nasikhin mengatakan, setelah proses validasi dan verifikasi selesai, pemerintah akan mengerahkan tim *appraisal* untuk menilai harga tanah milik warga yang menolak proyek PLTU berkapasitas 2 x 1.000 megawatt itu. "Hasil penilaian tim independen bisa sama atau lebih rendah dari harga sekarang," ujar Nasikhin.

³ konsinyasi/kon-si-nya-si/ n **1** larangan bagi tentara untuk meninggalkan kesatrian (dalam keadaan siaga); **2** larangan meninggalkan tempat kerja karena harus siap bertugas sewaktu-waktu atau harus menyelesaikan tugas yang mendesak; **3** berkumpulnya sejumlah petugas di suatu tempat untuk menggarap pekerjaan secara intensif serta tidak dibenarkan meninggalkan tempat kerja selama kegiatan berlangsung; **4** *Huk* penitipan uang kepada pengadilan (misalnya apabila penagih utang menolak menerima pembayaran); **5** *Dag* penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijual dengan pembayaran kemudian; jual titip (<https://kbbi.web.id>)

⁴ kasasi/ka-sa-si/ n *Huk* pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang; *kekuasaan hak -- hanyalah hak kekuasaan Mahkamah Agung* (<https://kbbi.web.id>)

Sebelum pembebasan tanahnya diambil alih pemerintah, PT BPI menetapkan ganti kerugian terakhir sebesar Rp 100 ribu per meter persegi. Namun warga yang sudah telanjur menjual lahannya ke PT BPI kini bergejolak lagi. Sebab ada warga yang mengaku lahannya dibeli oleh PT BPI seharga Rp 400 ribu per meter persegi pada awal 2014.

Akhirnya warga yang telah menjual lahannya dengan banti rugi Rp 100 ribu per meter persegi minta tambahan Rp 300 ribu per meter persegi. Namun PT BPI dan Pemkab Batang telah menyatakan pembelian seharga Rp 400 ribu itu dilakukan oleh spekulasi⁵.

Koordinator LSM Go Green Batang Andi Rudi Herianto mengatakan skema kerja sama pemerintah swasta (KPS) antara pemerintah dan PT BPI itu murni untuk kepentingan bisnis, meski produk yang diperjualbelikan adalah listrik bagi kepentingan umum.

"Campur tangan pemerintah dalam pembebasan lahan PLTU Batang bisa memicu kecemburuan investor lain yang terkendala masalah lahan," kata Andi. Dia menambahkan, anggaran pembebasan lahan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga mesti disahkan dalam pembahasan APBN atau APBD. "Padahal PLTU Batang ini murni proyek swasta," ujarnya.

Pemerintah belum menetapkan kepastian terkait harga tanah terakhir untuk keberlangsungan pembangunan PLTU. Apabila dalam proses selanjutnya tidak terjadi titik temu mengenai harga, masyarakat dapat mengajukan keberatan atas ganti kerugian, masyarakat dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI.⁶ Masyarakat yang tidak diketahui keberadaannya (tidak menerima ganti kerugian),

⁵ spekulasi/spe·ku·lan/ /spékulan/ n orang yang mencari keuntungan besar (dalam perniagaan dan sebagainya) dengan cara melakukan spekulasi (dugaan, perkiraan, dan sebagainya)

⁶ Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pasal 38 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan unutm Kepentingan Umum.

ganti kerugiannya tersebut dititipkan di pengadilan negeri.⁷ Dalam pasal 43 pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri, kepemilikan hak tanah yang “berhak” menjadi “hapus”, serta sertifikat tanda kepemilikan tanah tersebut tidak lagi berlaku dan tanah tersebut menjadi milik negara.

Pada dasarnya masyarakat berhak atas ganti untung oleh pihak pemerintah dikarenakan lahan petani dipaikai untuk kebijakan pemerintah yaitu memberi ijin pembangunan PLTU di Batang. Bunyi ketentuan umum Pasal 1 angka 2 undang-undang ini: “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Pasal 1 angka 10 menegaskan lagi: “Ganti Kerugian adalah penggantian layak dan adil kepada yang berhak dalam proses pengadaan tanah”.⁸

Pemerintah harus benar-benar bertanggung jawab pada permasalahan tanah tersebut. Pemerintah membuat kebijakan mengalih fungsikan lahan masyarakat pertanian berubah menjadi proyek PLTU seharusnya sudah mempersiapkan ganti kerugian terlebih dahulu, ganti kerugian tersebut sesuai dengan PP No. 1 Tahun 2011 ganti kerugian yang layak dan adil. Tidak hanya warga yang punya lahan yang minta ganti untuk tetapi masyarakat yang berkerja sebagai penggarap pun berhak atas ganti untung tersebut. Menurut peraturan Pemerintah No.1 tahun 2011 pasal 1 poin 6 yang

⁷ Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pasal 42 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan unuk Kepentingan Umum.

⁸ Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan unuk Kepentingan Umum.

berbunyi: “Lahan pengganti adalah lahan yang berasal dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/ atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan”.⁹

PT. Bhimasena Power Indonesia memberikan kompensasi kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar PLTU Batang, Jawa Tengah. Kompensasi sosial tersebut berbentuk bantuan dana tunai yang diberikan kepada petani penggarap dan buruh tani yang terdampak pembangunan PLTU Batang (bisnis.liputan6.com). Tetapi kenyataannya kompensasi sosial yang berbentuk bantuan dana tunai yang diberikan kepada petani penggarap dan buruh tidak tersalurkan secara merata masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan kompensasi dana tunai tersebut.

Tidak hanya bantuan secara tunai, masyarakat sekitar PLTU yang terkena dampak mendapatkan bantuan usaha untuk perempuan yang terdampak PLTU. Bantuan wiraswasta tersebut adalah bantuan berbentuk usaha antara lain laundry, kripik, anyam bamboo, koperasi simpan pinjam, dan masih banyak lagi. Berikut kutipan artikel :

Batang, ANTARA JATENG - PT Bhimasena Power Indonesia selaku pengembang proyek pembangkit listrik tenaga uap Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berkomitmen ikut menumbuhkan usaha mikro masyarakat secara berkelanjutan dalam menghadapi efek penggandaan ekonomi.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan

Manajer Corporate Social Responsibility (CSR) PT BPI, Bhayu Pamungkas, di Batang, Kamis, mengatakan bahwa untuk pengembangan usaha mikro masyarakat itu, PT BPI melakukan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat terdampak.

"Pelatihan kewirausahaan terhadap pelaku mikro masyarakat itu sekaligus sebagai upaya membangun usaha mandiri bagi kelompok usaha bersama (KUB). Kami berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal ini adalah anggota KUB binaan," katanya.

Menurut dia, kegiatan pelatihan kewirausahaan yang diikuti oleh 124 peserta tersebut merupakan bagian program CSR bidang pengembangan ekonomi bersama lembaga pendidikan dan pelatihan "KJK LDP Bina Mandiri" sebagai mitra lokal PT BPI.

Melalui program pelatihan tersebut, kata dia, jumlah KUB binaan PT BPI terus bertambah yaitu ada 153 unit dengan anggota 2.265 orang.

Ia mengatakan sejalan dengan jumlah KUB yang terus bertambah dan variasi usaha yang semakin beragam maka sejumlah pelatihan pun diberikan untuk meningkatkan kemampuan para anggota.

Para kelompok usaha tersebut, kata dia, tercatat memiliki aktivitas pada bidang produksi kerajinan, makanan olahan, hingga jasa simpan pinjam.

"Adapun bentuk dukungan BPI terhadap KUB tersebut antara lain berupa pendampingan kelompok, administrasi, sarana produksi, permodalan, dan menghadirkan jaringan pemasaran (offtaker)," katanya.

Bantuan yang diberikan oleh PT BPI tidak bertahan lama karena keterbatasan dana dan pemasukan dan pengeluaran tidak sesuai dengan kerja keras masyarakat. Masyarakat meminta pertanggungjawaban kepada BPI mengenai permasalahan tersebut, tetapi belum ada solusi yang ditawarkan BPI mengenai permasalahan tersebut.

Ketersediaan pasokan listrik dipastikan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, peluang usaha yang ada, dan bermanfaat bagi

industri rumah tangga, seperti jasa cuci pakaian dan konveksi, yang dilakukan warga Kabupaten Batang. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Batang, hal tersebut akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Tangkap Peluang Pembangunan PLTU di Batang mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Batang karena keberadaan proyek ketenagalistrikan itu diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk masuk ke wilayah setempat. Manfaat lainnya atas operasional pembangkit listrik tersebut, yakni bisa mengurangi pengangguran. Pemerintah Kabupaten Batang mengharapkan kepada PT Bhimasena Power Indonesia selaku pengembang PLTU Batang untuk bisa melibatkan pekerja lokal dalam pembangunan proyek itu (www.solopos.com). Tetapi kenyataannya masyarakat yang bekerja di PLTU banyak yang dari luar daerah juga bmenyerap tenaga kerja yang berumur produktif tetapi mayoritas masyarakat yang lahannya dialihfungsikan tersebut merupakan masyarakat yang tergolong berusia tua.

Dampak positif dalam jangka pendek pembangunan PLTU Batang tentunya akan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Banyaknya warga masyarakat yang bekerja di Proyek PLTU secara tidak langsung dapat meningkatkan roda perekonomian. Warga sekitar bisa membangun perumahan yang dapat disewa/dikontrakan ke pekerja-pekerja dari luar kota dan mendirikan tempat makan disekitar proyek pembangunan PLTU, yang secara tidak langsung berpengaruh kepada pendapatan masyarakat (kompasiana.com). Adanya proyek pembangunan PLTU Batang diklaim sangat diuntungkan secara tidak langsung dapat mengangkat

citra Kabupaten Batang, khususnya di kalangan investor sehingga mereka tidak ragu menanamkan investasi di Batang. Jika sudah ada investor besar yang mengawali masuk Batang, diharapkan banyak bermunculan investor-investor lain dari luar negeri, yang berkenan melirik Batang mengingat Batang sebenarnya menyimpan banyak potensi alam yang belum dimanfaatkan (kompasiana.com).

PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pengembang proyek pembangkit listrik tenaga uap Kabupaten Batang melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) di dalam lingkungan sekolah SD (sekolah dasar) dan SMP Ssekolah menengah pertama). CSR tersebut dalam bentuk pelaksanaan 'workshop' pembelajaran berbasis lingkungan. Berikut kutipan artikel :

Batang, ANTARA JATENG - PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pengembang proyek pembangkit listrik tenaga uap Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mendukung program sekolah berbudaya lingkungan di daerah setempat.

Manajer Corporate Social Responsibility (CSR) PT BPI ,Bhayu Pamungkas di Batang, Senin, mengatakan bahwa BPI akan terus berkomitmen dalam upaya mendukung sekolah berwawasan lingkungan di Kabupaten.

"Komitmen itu telah kami wujudkan dalam bentuk pelaksanaan `workshop` pembelajaran berbasis lingkungan. Melalui pendampingan program CSR, kami sudah melakukan kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan pada 9 sekolah," katanya.

Menurut dia, program sosial kemasyarakatan oleh BPI itu dilakukan sejak 2016 dalam upaya mendukung dan menginisiasi sejumlah sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di desa terdampak PLTU.

Untuk mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan itu, kata dia, BPI mengajak sekolah binaannya mengikuti beberapa rangkaian kegiatan

seperti studi banding, kajian lingkungan, berbagai `workshop`, dan pelatihan, serta pembentukan siswa peduli lingkungan.

"Selain itu, kami juga secara aktif mendukung dalam bentuk asistensi dan bantuan infrastruktur untuk 7 sekolah yang telah berpredikat adiwiyata," katanya.

Ia mengatakan 4 sekolah dari 9 sekolah yang mendapatkan dukungan penuh BPI telah mendapat predikat adiwiyata tingkat Kabupaten, yaitu; SD Negeri 02 Karanggeneng, SD Simbangjati, SD Negeri 01 Kenconorejo, dan SMP Negeri 02 Kandeman.

"Selain itu, satu sekolah binaan BPI yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) 02 Ujungnegoro, mendapatkan predikat sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Jateng," katanya.

CSR yang berbentuk workshop yang dilakukan oleh BPI termasuk dalam bentuk kepedulian BPI terhadap masyarakat termasuk anak-anak, agar anak-anak diharapkan nantinya dapat peduli dengan lingkungan, tidak hanya anak-anak atau siswa sekolah saja tetapi workshop tersebut juga dapat tertuju untuk semua masyarakat Indonesia. Diharapkan masyarakat sadar untuk menjaga dan menghormati lingkungan tidak hanya di sekitar tempat tinggal diharapkan masyarakat juga peduli dengan lingkungan di Indonesia bahkan lingkungan lingkup Dunia.

Dampak lingkungan pembangunan PLTU harusnya dijelaskan kepada publik karena menyangkut pertanggungjawaban terhadap risiko kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem, baik di darat maupun laut. Warga yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi proyek berhak memperoleh informasi yang akurat seputar dampak-dampak lingkungan pembangunan PLTU dan penanggulangannya. Ini penting agar masyarakat tidak dihantui ketakutan akan

bahaya PLTU yang ditimbulkan di kemudian hari. PLN yang ingin mencoba merealisasikan janjinya memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen listrik di Tanah Air, juga mendorong pemilik dan pelaksana proyek PLTU dalam mengendalikan, mengelola dan mengupayakan untuk memperkecil dampak negatif tersebut. Dalam menentukan lokasi pun perlu menghindari daerah-daerah sensitif yang dapat menimbulkan dampak negatif penting, misalnya daerah yang menyimpan peninggalan sejarah, yang padat penduduk dan atau yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang layak dilestarikan (kompasiana.com).

Penulis mengambil Kecamatan Kandeman Desa Karanggeneng, Kabupaten Batang sebagai lokasi penelitian, berdasarkan penelitian dan wawan cara ke perangkat desa Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng dikatakan bahwa Desa Kranggeneng merupakan Desa yang memiliki dampak yang lebih besar dalam pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) tersebut. Jumlah warga yang pro kurang lebih 400 orang dan kurang lebih 345 orang yang kontra dengan PLTU dan diantaranya 53 orang pemilik lahan dilokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) (M. Hijrah Saputro 2010: 6-7). Masyarakat di Desa Karanggeneng karena Sumber Daya Manusa (SDM) nya rendah sehingga mudah terprovokasi. Dampak dari PLTU masyarakat mengalami perubahan sosial, masyarakat terpaksa beralih matapencarian karena lahan yang digunakan untuk pembangunan proyek tersebut merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat Desa Karanggeneng.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan di latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah, antara lain:

1. Kebutuhan masyarakat (pemilik tanah) untuk menjual tanahnya ke PT BPI
2. Munculnya pro dan kontra dari masyarakat karena kehilangan matapencaharian akibat alih fungsi lahan PLTU
3. Menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat Desa Karanggeneng
4. Munculnya dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan PLTU Batang
5. Bantuan dari BPI (Bhimasena Power Indonesia) untuk masyarakat tidak bertahan lama.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sudjana (1999: 21-22) pengertian masalah dapat dijelaskan sebagai berikut: “Masalah dalam penelitian harus memenuhi persyaratan untuk dapat diteliti dan dipecahkan, sehingga penelitian ilmiah yang didasarkan pada metode berfikir mampu menemukan kemungkinan-kemungkinan jawaban terhadap permasalahan yang ada.”

Dari penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah adalah:

“Apakah dampak kebijakan pembangunan PLTU terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat Desa Karanggeneng, Kabupaten Batang?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

“Mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan PLTU terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat Desa Karanggeneng di Kabupaten Batang.”

1.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Tujuan	Hasil
1.	Agus Gunawan	2015	Upaya Pemda Dalam Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Untuk Pembangunan PLTU (Studi Kasus Di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui persoalan apa yang timbul dalam alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian untuk pembangunan PLTU. 2. Untuk mengetahui regulasi alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian untuk pembangunan PLTU melalui dinas-dinas terkait yaitu Kantor Bappeda, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. 3. Untuk mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Batang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya persoalan dalam pelaksanaan pembangunan PLTU Batang yaitu adanya ketidaksepakatan besaran ganti rugi yang diterima warga, kurangnya pengetahuan pemilik hak atas tanah mengenai fungsi social tanah sehingga masih ada warga yang mempertahankan tanahnya dengan tidak mau diganti rugi. Besaran harga ganti rugi disamaratakan, pihak pengembang dalam penentuan harga ganti rugi tidak memperhatikan letak strategis tanah dan lahan pertanian produktif. 2. Kebijakan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan PLTU Batang yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan juga Ijin Lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang tidak melanggar ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031. 3. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam pembangunan PLTU Batang yaitu dengan

				<p>melalui Kantor Bappeda dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dalam alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian untuk pembangunan PLTU.</p>	<p>melakukan musyawarah mufakat atau pendekatan secara persuasif kepada pemilik tanah mengenai besaran ganti rugi dengan membentuk forkom guna menjembatani adanya komunikasi antara warga dan pihak pengembang.</p>
2.	Moh. Sifak	2006	Strategi Pendekatan Sosial Dalam Proses Rencana Pembangunan PLTU Batang	<p>1. Adanya persoalan dalam pelaksanaan pembangunan PLTU Batang yaitu adanya ketidaksepakatan besaran ganti rugi yang diterima warga, kurangnya pengetahuan pemilik hak atas tanah mengenai fungsi social tanah sehingga masih ada warga yang mempertahankan tanahnya dengan tidak mau diganti rugi. Besaran harga</p>	<p>1. Adanya persoalan dalam pelaksanaan pembangunan PLTU Batang yaitu adanya ketidaksepakatan besaran ganti rugi yang diterima warga, kurangnya pengetahuan pemilik hak atas tanah mengenai fungsi social tanah sehingga masih ada warga yang mempertahankan tanahnya dengan tidak mau diganti rugi. Besaran harga ganti rugi disamaratakan, pihak pengembang dalam penentuan harga ganti rugi tidak memperhatikan letak strategis tanah dan lahan pertanian produktif.</p> <p>2. Kebijakan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan PLTU Batang yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan juga Ijin Lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang tidak melanggar ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang dengan dikeluarkannya</p>

				<p>ganti rugi disamaratakan, pihak pengembang dalam penentuan harga ganti rugi tidak memperhatikan letak strategis tanah dan lahan pertanian produktif.</p> <p>2. Kebijakan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan PLTU Batang yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan juga Ijin Lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang tidak melanggar ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031.</p> <p>3. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam pembangunan PLTU Batang yaitu dengan melakukan musyawara mufakat atau pendekatan secara persuasif kepada pemilik tanah mengenai besaran ganti rugi dengan membentuk forkom guna menjembatani adanya komunikasi antara warga dan pihak pengembang.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Kabupaten Batang dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031.</p> <p>3. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam pembangunan PLTU Batang yaitu dengan melakukan musyawarah mufakat atau pendekatan secara persuasif kepada pemilik tanah mengenai besaran ganti rugi dengan</p>	
--	--	--	--	--	--

				membentuk forkom guna menjembatani adanya komunikasi antara warga dan pihak pengembang.	
3.	Emi Anwaru l Prastiw i, Etty Soesilo wati, Dewi Liesnoo r Setyow ati	2016	Strategi Pendekatan Sosial Dalam Proses Rencana Pembangunan PLTU Batang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme dan implementasi proses perencanaan pembangunan PLTU Batang, 2. Menganalisis dan mendiskripsikan kendala dalam proses perencanaan pembangunan PLTU Batang, 3. Menganalisis strategi pendekatan sosial pada masyarakat sekitar proyek pembangunan PLTU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan PLTU Batang terdiri dari tiga tahap yaitu survei, pengadaan lahan dan sosialisasi proyek. Pemrakarsa telah melaksanakan ketiga tahapan tersebut secara kontinue. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan warga pemerintah daerah dan pemerintah desa serta tokoh masyarakat. 2. Implementasi Rencana Pembangunan Proyek PLTU mencakup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) telah dilakukan oleh PT BPI . RKL telah terbentuk forum komunikasi pada empat desa yang mempunyai fungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam mengkomunikasikan masukan, saran, pengajuan kegiatan, dan lainnya kepada PT BPI dan pemerintah kabupaten Batang. Partisipasi pemrakarsa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan melalui program pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, social ekonomi

					<p>budaya, keagamaan, dan infrastuktur.</p> <p>3. Penolakan dari sebagian masyarakat meyebabkan rencana pembangunan PLTU tersendat. Program yang telah dicanangkan sejak tahun 2011 belum dapat direalisasikan. Masyarakat yang menolak rencana pembangunan PLTU enggan menjual lahan, menyebabkan kebutuhan lahan untuk area PLTU belum terpenuhi. Faktor penyebab masyarakat enggan menjual lahan antara lain belum ada kecocokan harga dan faktor lingkungan. Kekhawatiran masyarakat akan tercemarnya lingkungan menjadi penyebab penolakan. Kawasan pantai yang selama ini menjadi lahan mata pencaharian masyarakat akan menjadi tercemar dan menyebabkan hilangnya lahan pekerjaan.</p> <p>4. Pemerintah telah melakukan upaya untuk meminimalisir konflik yang terjadi pada masyarakat akibat penolakan rencana pembangunan PLTU. Pendekatan partisipatif telah dilakukan dengan membentuk forum komunikasi untuk lebih mendekatkan masyarakat dengan pihak pemrakarsa dan pemerintah. Sebagian masyarakat menyatakan pembentukan forum komunikasi kurang efisien karena tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Forum komunikasi yang terbentuk hanya lingkup desa belum memenuhi lingkup</p>
--	--	--	--	--	---

					daerah area proyek PLTU. Pendekatan partisipatif harus lebih diefektifkan dengan membentuk kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah sebagai fasilitator, PT BPI sebagai pemrakarsa proyek dan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Masyarakat yang merasa ikut memiliki kepentingan dengan dibangunnya PLTU diharapkan akan menerima rencana pembangunan PLTU sehingga pembangunan PLTU akan segera dapat direalisasikan.
4.	Bayu Aji Prakoso	2016	Evaluasi Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B di Desa Tuban Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara	Untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan PLTU Jati B di desa Tuban Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara	Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh PLTU Tanjung Jati B terhadap lingkungan di Desa Tuban Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, yang meliputi aspek individu, organisasi, masyarakat serta lembaga dan sistem social, dalam evaluasi dampak terhadap PLTU Tanjung Jati B tersebut, penulis menggunakan evaluasi model bebas tujuan yang terdiri dari tiga indicator yaitu pengaruh sampingan yang negative yang tidak diharapkan, pengaruh positif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan pengaruh sampingan positif diluar program yang ditetapkan.
5.	Dimas Widya Prasetya	2016	Dampak Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri	Untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunana kawasan industri terhadap kesejahteraan	Kesejahteraan memang meruakan suatu hal yang sangat kompleks serta suatu hala yang sangat erat katannya dengan manusia sebagai makhluk social. "warga di Kecamatan Genuk belum merasakan kesejahteraan pasca didirakannya kawasan industri

			Terhadap Kesejahteraan Warga di Kecamatan Genuk	setiap warga di kecamatan Genuk	dan dirasakan oleh yang lebih banyak daripada dampak positif dari kawasan industri” meskipun tujuan utama dari kebijakan pembangunan kawasan industri di kecamatan gemuk telah dapat terpenuhi, yakni peningkata pendapatan Kota Semarang.
6.	Rina Ade Saputri	2017	Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi dalam Pengembangan Wisata Goa Seplawan di Kabupaten Purworejo		

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.

Ruang lingkup suatu administrasi publik meliputi dimensi – dimensi strategis yaitu (Keban, 2008 : 11) :

1. Dimensi Kebijakan : Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak manusia dengan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.
2. Dimensi Organisasi: Berkenaan dengan pengaturan struktur dan hirarki yang meliputi pembentuk unit. Pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga

publik). Penetapan prosedur aturan dan standar untuk mencapai tujuan organisasi. Proses tersebut dapat diumpamakan dengan sistem organ tubuh manusia, yang memiliki peran dan fungsi tersendiri. Dan siap melaksanakan tugasnya setelah mendapat perintah dari otak.

3. Dimensi Manajemen : Menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan (digerakan, diorganisir, dan dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip tertentu.
4. Dimensi Moral atau Etika : Menjadi salah satu dimensi yang terpenting dalam administrasi publik karena kegiatan administrasi publik berkenaan dengan maksud dan tujuan publik tertentu, diarahkan untuk memuaskan kepentingan atau kebahagiaan publik, dan dijalankan dengan kewajiban dan motif yang benar.
5. Dimensi Lingkungan : Dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika, dan kinerja dalam administrasi publik, sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal administrasi publik yaitu lingkungan. Baik bagaimana situasi lingkungan disini dapat dilihat dari sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu negara yang sangat mempengaruhi atau mendikte administrasi publik. Karena itu kemampuan mengenal dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan menjadi sangat penting.
6. Dimensi Akuntabilitas Kinerja : Untuk apakah kebijakan, organisasi, manajemen, dan moral yang dijalankan secara profesional. Dan untuk apakah

harus disesuaikan dengan lingkungan? Jawabnya terhadap pertanyaan tersebut berkenaan dengan tuntutan akuntabilitas yaitu bahwa dunia administrator yang telah dipercayakan sebagai pihak yang perbuatan dan keputusannya kepada publik seharusnya mereka layani dalam bentuk kerja. Dengan demikian dimensi terakhir dari administrasi publik adalah adimensi akuntabilitas kinerja. Dimensi ini menggambarkan bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan riil dari administrasi publik didalam suatu negara.

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (2012: 21) mendefinisikan Administrasi publik adalah 1) Kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, 2) Meliputi tiga cabang pemerintahan : legislatif, eksekutif, dan hubungan diantara mereka, 3) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, 4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan pada masyarakat, 5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian administrasi perseorangan.

Sedangkan Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam (Syafie 2006:13), Administrasi adalah suatu fenomenal sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Jadi barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan kelompok orang dalam lingkup pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang menyangkut pelayanan kepada orang banyak dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu administrasi publik telah tumbuh menjadi sistem penyelenggaraan kebijakan publik dan semakin penting peranannya dalam proses kebijakan publik.

Kalau diikuti rumusan-rumusan administrasi negara, maka akan diperoleh berbagai definisi. Seseorang mencoba untuk memberikan rumusan yang relatif taja dalam lingkaran akademis, orang lain memberikan tandingan rumusan konsepsi yang tidak kalah pentingnya. Sehingga menurut Nicholas Henry, terdapat krisis definisi dalam administrasi negara. Itulah sebabnya ia menyarankan untuk memahami lebih jauh tentang administrasi negara. Lewat paradigma dalam administrasi negara amat bermanfaat, karena dengan demikian seseorang akan mengetahui tempat di mana bidang ini dipahami dalam tingkatannya yang sekarang ini (Miftah Thoha, 2010:18).

Administrasi negara telah dikembangkan sebagai suatu kejian akademis melalui lima paradigma. Tiap fase dari paradigma tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan *locus* dan *fokus*-nya. *Lokus* menunjukkan di mana bidang ini secara institusional berada. *Lokus* menunjukkan tempat dari bidang studi tersebut. Adapun fokus menunjukkan sasaran spesialisasi dari bidang studi. Paradigma dalam administrasi menurut Robert T. Golembiewski hanya dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah-istilah *lokus* dan *fokus* tersebut. Dengan demikian,

definisi-definisi administrasi negara kalau dikembalikan pada istilah Golembiewski tersebut akan mudah dipahami bahwa seseorang penulis akan masuk paradigma yang mana. Karena dari istilah-istilah yang dipergunakan dapat diketahui lokus *locus* dan *fokus*-nya (Miftah Thoha, 2010:18).

- Paradigma I (1900-1926) dikenal sebagai Dikotomi Politik dan Administrasi.
- Paradigma II (1927-1937) disebut dengan Prinsip-prinsip Administrasi.
- Paradigma III (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu
- Paradigma IV (1956-1970) adalah Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu
- Paradigma V (1970-sekarang) merupakan paradigma terakhir yang disebutkan oleh yang disebutkan oleh Nicholas Henry, yakni Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (Miftah Thoha, 2010:18).

Dari kelima paradig di atas dalam penelitian penulis menggunakan paradig ke V yaitu Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara, tahun 1970. Paradigma ini telah memiliki lokus dan fokus yang jelas, fokus dari administrasi publik adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik.

Lokus dari administrasi publik ini adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik (Keban, 2008:33). Paradigma tersebut sesuai dengan penelitian penulis. Pembangunan PLTU Batang yang berada di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman. Dibangunnya pembangkit listrik di Kabupaten Batang diharapkan dapat mensuplai kebutuhan listrik rumah tangga dan industri di Jawa

Tengah serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi, ataupun perluasan peluang kerja terutama masyarakat di Kabupaten Batang.

1.6.2 Good Governance

Istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Muhammad Ilham Arisaputra, 2013 : 191). Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa “Konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif daripada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas” (Muhammad Ilham Arisaputra, 2013:192).

Kasman Abdullah mengemukakan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis. *Good governance* dengan begitu saja disamaartikan

dan telah menggeser terminologi lama, yaitu *good government*, yang dipandang tidak mujarab lagi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat (Muhammad Ilham Arisaputra, 2013 191-19).

The United Development Programme (UNDP) mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai *Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population*. Lebih lanjut UNDP menegaskan bahwa *"It is complex mechanisms, process, relationships, and institutions through which citizens and groups articulate their interest, exercise their rights and obligation and mediate their differences"* (Muhammad Ilham Arisaputra, 2013: 192).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* (Muhammad Ilham Arisaputra, 2013: 192). Lebih lanjut LAN menegaskan bahwa dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif

dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya (Muhammad Ilham Arisaputra, 2013: 192)

Good dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Muhammad Ilham Arisaputra, 2013: 193)

UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “*that good governance system are participatory, implying that all members of governance institution have a voice in influencing decision-making*”. Sistem pemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan bahwa semua anggota institusi *governance* memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi. Prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan (*transparent*) agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Siapa saja yang dipilih untuk membuat keputusan dalam pemerintahan, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat sipil (*business and civil*

society organizations) harus bertanggung jawab kepada publik, serta kepada institusi stakeholders. Institusi governance harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan rakyat, memfasilitasi (*fasilitative*) dan memberi peluang (*enabling*) ketimbang mengontrol (*controlling*), melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan (*the rule of law*) (Muhammad Ilham Arisaputra, 2013: 193)

Bank Dunia memberi batasan good governance sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya. Gerald Meier memberikan pengertian good governance, yaitu "prinsip mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada publik, dan dimana mekanisme pasar merupakan pertimbangan utama dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi sumberdaya" (Muhammad Ilham Arisaputra, 2013: 193)

Selanjutnya Sedarmayanti mengelompokkan unsur-unsur pemerintahan (governance stakeholders) ke dalam 3 kategori, yaitu:

- a. Negara/Pemerintahan; konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (Civil Society Organization).

- b. Sektor Swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (manufacturing), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat Madani (Civil Society); kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi (Muhammad Ilham Arisaputra, 2013: 194)

Menurut Miftah Thoha, selain dari komponen pemerintah, swasta, dan rakyat, satu komponen yang amat menentukan untuk melahirkan tata pemerintahan yang baik adalah moral. Moral menghubungkan ketiga komponen tersebut yang saling berinteraksi menciptakan tata pemerintahan yang baik. Moral merupakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama. Ajaran agama melekat pada pribadi-pribadi yang berada pada ketiga komponen tersebut. Dengan melaksanakan ajaran agamanya pada masing-masing komponen tersebut, maka moral masing-masing pelaku akan berperan besar sekali dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (Muhammad Ilham Arisaputra, 2013: 195)

1.6.3 Kebijakan Publik

Istilah “kebijakan”, atau “policy”, merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jones dalam Winarno (2012:16), istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah tersebut sering kali dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decision), standard, proposal, dan grand design. Friedrich pun memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu (Winarno, 2012:18). Oleh karenanya, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu hasil dari tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan maupun sasaran tertentu.

Istilah kata “publik” setelah kata kebijakan mengacu pada masyarakat secara luas. Namun, bukan berarti kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh masyarakat secara luas. Kebijakan publik lebih merujuk kepada keputusan yang diambil oleh pemerintah yang berdiri sebagai wakil rakyat, khususnya di negara-negara yang menganut sistem demokratis.

Dalam literatur mengenai kebijakan publik, terdapat beberapa pakar yang telah memberikan definisi mengenai istilah kebijakan publik itu sendiri. Dye

mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Winarno. 2012:17). Dalam hal ini, maka Dye menganggap bahwa keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu akan memberikan dampak yang sama besarnya dengan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Anderson dalam Winarno (2012:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Dalam hal ini, maka, kebijakan publik pun diharapkan dapat memberikan dampak terhadap persoalan - persoalan dan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Sumodiningrat (2007), kebijakan publik sedikitnya mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai;
2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih;
3. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah;
4. Program, yaitu seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan; dan
5. Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.

Sedangkan menurut Wiliiam N. Dunn (2003:132), Kebijakan Publik (Public Policy) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan politis untuk mengimplementasikan program dalam meraih tujuan demi kepentingan masyarakat (Putra dalam Fermana, 2009:38). Dalam membuat keputusan pada kebijakan publik, hal tersebut tentu saja harus mengakomodasikan tuntutan masyarakat yang tuntutan tersebut didelegasikan kepada seseorang atau kelompok dalam model demokrasi perwakilan. Akan tetapi, cita-cita sosial dan tuntutan seorang individu dalam masyarakat tidak jarang mengalami perbedaan pemahaman. Hal ini sering kali mengakibatkan tabrakan kepentingan oleh pada delegasi yang dipilih untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh cara pandang individu terhadap preferensi individual, etika, kebebasan individu, hak individual, dan distribusi keadilan (Fermana, 2009:38-40).

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kebijakan publik, dapat disimpulkan kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang telah dibuat pemerintah yang bertujuan untuk hal yang lebih baik bagi masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak lain adalah hasil dari sebuah kebijakan tersebut. salah satunya adalah Keputusan Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memutuskan untuk membangun Pembangkit Listrk Tenaga Uap (PLTU). Kebijakan tersebut tentunya melalui proses sebagaimana mastinya.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (1999:24) di dalam gambar 1.1 adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

Ilustrasi : Legislator negara dan co- sponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Atau rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Karakteristik : Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

Ilustrasi : Peradilan Negara Bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas.

3. Adopsi Kebijakan

Karakteristik : Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

Ilustrasi : Dalam keputusan Mahkamah agung pada kasus Roe.v. Wade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.

4. Implementasi Kebijakan

Karakteristik : Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

Ilustrasi : Bagian Keuangan Kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakita yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak.

5. Penilaian Kebijakan

Karakteristik : Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemeritnahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Ilustrasi : Kantor akuntansi publik memantau program- program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi.

Gambar 1.1 Kedekatan prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuatan kebijakan



Sumber: Willia Dunn, 1999:25

1.6.4 Evaluasi

Samodra Wibawa (1994, 9-40). Kegiatan evaluasi dalam beberapa hal mirip dengan pengawasan dan kontrol. Pelaku utamanya jelas pemerintah, akan tetapi sering pelaku yang lain seperti lembaga penelitian yang independen, partai politik, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Evaluasi tersebut tidak hanya terjadi pada saat akhir saja, tetapi pada setiap proses, baik formulasi maupun implementasi. Evaluasi kebijakan merupakan aktivitas ilmiah yang perlu dilakukan oleh para pengambil kebijakan di dalam tubuh birokrasi pemerintah maupun organisasi sosial dan politik. Di tangan aktor kebijakan ini, evaluasi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu memberikan masukan bagi

penyempurnaan kebijakan. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas program-program mereka sehingga meningkat pula kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian, hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi agar pemerintah melakukan perbaikan terhadap kebijakannya sehingga asas keadilan, pemerataan, dan demokrasi lebih diperhatikan oleh pemerintah.

Evaluasi ada dua, yang pertama evaluasi implementasi, dan yang kedua yaitu evaluasi dampak kebijakan. Ada tiga buah model evaluasi implementasi kebijakan. Pertama, model Meter dan Horn yang menjelaskan hubungan antar aktor yang mempengaruhi hasil dan kinerja suatu kebijakan, yaitu; (1) kompetensi dan jumlah staf, (2) rentang dan derajat pengendalian, (3) dukungan politik yang dimiliki, (4) kekuatan organisasi, (5) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, (6) keterkaitan dengan pembuat kebijakan. (Samodra Wibawa 1994:20-21)

Kedua, model Grindle yang menyatakan keefektifan implementasi kebijakan tergantung dari isi kebijakan dan konteks implementasinya. Menurut Grindle, isi kebijakan mencakup; (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) pelaksana program, (6) sumberdaya yang digunakan. (Samodra Wibawa 1994:22)

Ketiga, model Sabatier dan Mazmian, yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu; (1) karakteristik masalah, (2) struktur manajemen program, (3) faktor-faktor diluar peraturan. Model ini

menekankan pada perhatian pada dua hal mendasar, yaitu kebijakan dan lingkungan kebijakan. Kelemahannya yaitu, Sabatier dan mazmanian terlalu menganggap suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi peraturan yang telah dibuat. (Samodra Wibawa 1994:25)

Dengan memahami model-model tersebut, para evaluator dapat lebih cermat melakukan evaluasi, sehingga banyak persoalan dapat dianalisis secara komprehensif dan tidak parsial, dan serta dapat memperluas hasil pengamatan evaluator. Selanjutnya yaitu evaluasi dampak kebijakan, yaitu evaluasi yang memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. Dalam buku ini dijelaskan, ada dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan maksudnya adalah ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Lebih dari itu, pada akhir implementasi kebijakan muncul juga dampak-dampak yang tidak terduga.

Evaluasi dilaksanakn untukmencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasi. Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain adalah:

- a. Mengukur pengaru pogram terhadap masyarakat. Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi social (*social intervention*) untuk menyelesaikan masalah, problem, situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat.
- b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Setiap program direncanakan dengan teliti danpelaksanaannya harus sesuai dengan rencana tersebut.

- c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai standar tertentu.
- d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, aman yang tidak berjalan.
- e. Mengembangkan staf program
- f. Memenuhi ketentuan undang-undang
- g. Akreditasi program
- h. Engukur cost effectiveness dan cost efficienc
- i. Mengambil keputusan mengai program
- j. Accountabilitas
- k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program
- l. Memperkuat posisi politik
- m. Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi.

Dengan demikian tujuan dari penulisan daam melakukan evaluasi adalah untuk mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.Untuk melihat program yang dirancang dan dilaksanakan adalah sebagai layanan atau intervensi social (*social intervention*) untuk menyelesaikan masalah, problem, situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat.

1.6.5 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan mengukur suatu kebijakan berhasil atau gagal berdasarkan indikator - indikator yang telah ditetapkan. Indikator - indikator evaluasi kebijakan menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil (Indiahono, 2009: 145). Menurut A.G Subarsono, evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilaksanakan apabila suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan tetapi tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Semakin strategis suatu kebijakan maka diperlukan tenggang waktu yang panjang dalam melakukan evaluasi kebijakan. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan maka evaluasi dapat dilakukan dengan kurun waktu yang lebih cepat semenjak kebijakan sudah diimplementasikan.

Tidak jarang kebijakan publik gagal mencapai tujuan - tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan demikian evaluasi ditujukan untuk mencari sebab - sebab kegagalan suatu kebijakan atau apakah kebijakan publik telah memperoleh dampak yang diinginkan sebelumnya. Secara singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Menurut Lester dan Stewart evaluasi kebijakan dapat dibedakan dalam dua tugas yang berbeda. Yang pertama untuk menetapkan konsekuensi dengan menjabarkan hasil dari kebijakan sedangkan yang kedua menilai berhasil atau gagal suatu kebijakan berdasarkan kriteria - kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Tugas pertama melihat kebijakan publik mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dari suatu kebijakan. Apabila tidak memenuhi dari tujuan semula maka mencari faktor - faktor penyebab. Pada tugas kedua tidak dapat dipisahkan dari tugas pertama karena sangat berkaitan. Setelah mengetahui konsekuensi kebijakan melalui hasil kebijakan yang telah digambarkan, maka kita akan mengetahui hasil kebijakan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang diinginkan sebelumnya. Kesimpulannya tugas kedua menilai apakah berhasil atau gagal dalam meraih ketercapaian tujuan yang diinginkan. (Winarno, 2012: 226)

Samodra Wibawa dalam Dwidjowijoto (2006:156-157) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu

a) Eskplanasi

Evaluasi dapat memotret realitas pelaksanaan program dan dapat membuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

b) Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai atau tidak dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

c) Audit

Melalui evaluasi juga dapat diketahui apakah output kebijakan sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru terjadi kebocoran atau penyimpangan.

d) Akunting

Dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat dilihat akibat sosial-ekonomi dari suatu kebijakan.

Berdasarkan ke-empat fungsi evaluasi kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah aktivitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kebijakan yang dijalankan sudah mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, berapa biaya yang dikeluarkan, keuntungan apa yang didapat serta siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan dari Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Evaluasi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut (Subarsono, 2011:120-121) :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur atau menilai tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak dari suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan - penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn dalam buku Analisis Kebijakan Publik (Subarsono, 2012: 124-125), yakni :

- a. Evaluasi Semu adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok atau masyarakat.
- b. Evaluasi Formal adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai

hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.

- c. Evaluasi Proses adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil - hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat menyimpang dari hasil yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (Subarsono, 2012:126) mencakup lima indikator sebagai berikut :

Tabel 1.1 Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
4	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber : W.Dunn dalam Subarsono (2012: 126)

1. Efektivitas

Menurut W.Dunn (2012: 127), efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari

tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Efisiensi

Menurut W.Dunn (2012: 127), efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Menurut W.Dunn (2012: 128), kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Pemerataan

Menurut W.Dunn (2012: 128), pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara

adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

5. Responsivitas

Menurut W.Dunn (2012: 129), responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, kecukupan, dan pemerataan.

6. Ketepatan

Menurut W.Dunn (2012: 130), ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan

tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Sedangkan menurut Langbein dalam Subarsono (2006 : 126), indikator evaluasi dilihat dari beberapa permasalahan publik, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi, indikatornya adalah peningkatan produktivitas sumberdaya dan peningkatan efisiensi ekonomi
- b. Keadilan distribusi, indikatornya adalah kecukupan, keadilan horisontal, dan keadilan vertikal
- c. Preferensi warga negara, indikatornya adalah kepuasan warga negara dan seberapa jauh preferensi masyarakat termuat dalam kebijakan publik.

Menurut James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

- a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan PLTU Batang, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Edi Suharto (2012:61), tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Menurut Edi Suharto (2012: 86), model-model yang umumnya digunakan dalam analisis kebijakan publik adalah:

- a. Model Prospektif adalah bentuk kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif
- b. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasa disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan
- c. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan.

Evaluasi Kebijakan juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis menurut Wirawan (2011: 16-25), antara lain:

1) Menurut Objeknya

Evaluasi dapat dikelompokkan berdasarkan objek dan menurut focus dalam suatu program. Menurut objeknya evaluasi dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Evaluasi Kebijakan

Dalam pengertian sempit Negara diperintahkan oleh eksekutif yang terdiri dari presiden, para menteri, gubernur, bupati dan walikota. Dalam melaksanakan tugasnya eksekutif menyusun dan melaksanakan kebijakan. Misalnya, dalam upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia, Menteri Pendidikan Nasional menyusun dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional. Jadi kebijakan adalah rencana umum dalam melaksanakan fungsi dan tugas menteri. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan baru. Umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Setiap kebijakan harus dievaluasi untuk menentukan apakah kebijakan bermanfaat dapat mencapai tujuan, dilaksanakan secara efisien dan untuk pertanggungjawaban pelaksanaannya.

b. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktifitas yang direncanakan untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah tercapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*), dan evaluasi akibat (*impact evaluation*). Evaluasi proses meneliti

dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dijalani.

c. Evaluasi Proyek

Proyek adalah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program. Jangka waktu tersebut dapat satu tahun, enam bulan, seminggu, bahkan sehari. Misalnya, untuk mengembangkan program pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dirancang dan dilaksanakan proyek Pengembangan Fasilitas Pendidikan dengan aktifitas pengadaan fasilitas laboratorium dan mendidik tenaganya dan dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Pelaksanaan proyek tersebut perlu dievaluasi untuk mengukur kinerja dan manfaat proyek.

d. Evaluasi Material

Untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk tertentu. Misalnya untuk melaksanakan program pembelajaran matematika diperlukan buku teks matematika. Buku teks matematika harus memenuhi standar tertentu misalnya, isinya, keterbacaannya, gambar/iliustrasi, kertasnya, topografinya, penjidannya, dan sebagainya. Buku matematika yang akan dipergunakan dievaluasi berdasarkan standar buku teks tersebut.

e. Evaluasi Sumber Daya Manusia

Evaluasi sumber daya manusia, evaluasi personalis atau evaluasi kinerja telah dilakukan pada tahun 2000 SM di Cina untuk merekrut dan manila pegawai

kerajaan. Dewasa ini evaluasi kinerja sumber daya manusia dilaksanakan di semua lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, lembaga bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat. Keberhasilan organisasi pendidikan, lembaga bisnis, dan lembaga pemerintah sangat ditentukan oleh kinerja para pendidik (guru dan dosen) dan para pegawai organisasi tersebut, oleh karena itu mereka harus dievaluasi kinerjanya secara periodik.

2) Menurut Fokusnya

Menurut fokusnya, evaluasi dapat digolongkan menjadi asesmen kebutuhan, evaluasi keluaran, dan evaluasi efisiensi.

a. Asesmen kebutuhan (*need assessment*) adalah mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh organisasi atau masyarakat.

b. Evaluasi proses

Evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Factor yang dinilai antara lain layanan dari program, pelaksanaan layanan, pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dilayani, sumber-sumber yang dipergunakan, pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana dan kinerja pelaksanaan program. Diidentifikasi juga dalam evaluasi proses perkembangan pengaruh dari program terhadap pemangku kepentingan program.

c. Evaluasi keluaran

Evaluasi keluaran (*outcome*) merupakan evaluasi sumatif yaitu mengukur dan menilai keluaran dan akibat atau pengaruh dari program. Data yang dijarah antara lain mengenai:

- a. Hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan yang direncanakan
 - b. Jumlah dan jenis orang yang dilayani apakah sesuai dengan yang direncanakan
 - c. Pengaruh atau akibat dari program terhadap orang yang mendapatkan layanan, apakah terjadi perubahan atau perbedaan dari sebelum dan sesudah mendapatkan layanan program.
 - d. Evaluasi keluaran juga mengidentifikasi apa yang harus dilakukan agar program dapat berlangsung terus menerus.
- d. Evaluasi Efisien

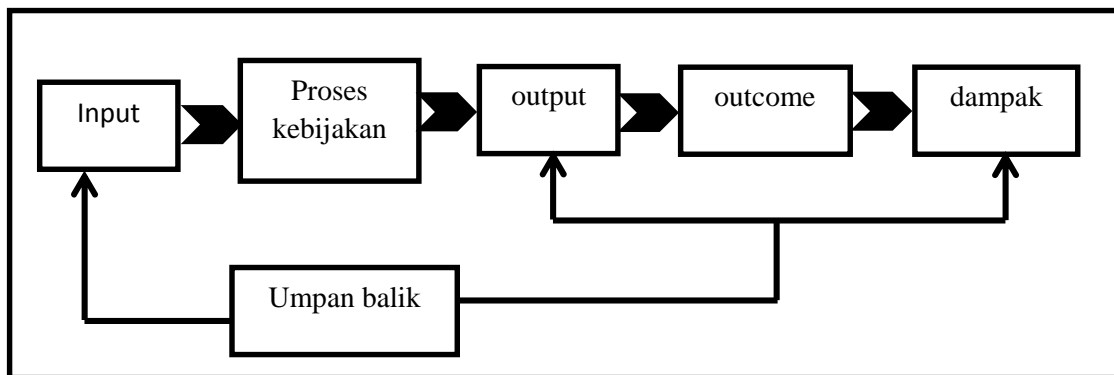
Suatu kebijakan, program atau proyek hanya dapat dilaksanakan dengan baik jika didukung oleh biaya atau anggaran (*cost*) tertentu. Akan tetapi, anggaran seperti karet, dapat ditarik dan dapat dikerutkan. Karena sumber biaya terbatas, maka anggaran yang baik dan tepat adalah anggaran yang pas tidak kurang dan tidak lebih dari pada yang dibutuhkan program.

Berdasarkan jenis-jenis evaluasi kebijakan tersebut, evaluasi yang ditentukan sebagai langkah penilaian dampak lingkungan di Desa Karanggeneng akibat pembangunan PLTU dengan mengevaluai kebijakan pembangunan PLTU untuk menilai satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana kebijakan

tersebut sudah sesuai yang diharapkan atau tidak, serta dampak yang terjadi akibat adanya sebuah kebijakan tersebut.

Evaluasi ini, tujuannya adalah untuk menilai dan melihat hal apa yang terjadi atau dampak apa yang terjadi setelah kebijakan tersebut dijalankan. Kita tahu jika dalam pembangunan PLTU tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keadaan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari pembangunan PLTU berpengaruh terhadap keadaan masyarakat sekitar PLTU dimana masyarakat tersebut mengalami sebuah permasalahan ekonomi, social dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang merasakan dampaknya akan berkurang. Dilakukannya evaluasi untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi dan yang dirasakan masyarakat setempat.

Gambar 1.2 Kebijakan sebagai suatu proses



Sumber: Wirawan (2011 : 109)

Proses evaluasi kebijakan diatas, bertujuan untuk melihat hasil akhir berupa dampaknya, dimana dampak yang dihasilkan tersebut menguntungkan atau merugikan. Untuk melihat dampak yang terjadi dari evaluasi pembangunan PLTU tersebut.

1.6.6 Definisi Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat yang baik positif maupun negative. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang yang dipengaruhi (KBBI Online 2016). Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negative. (Rizki Dwiarti Ratna Pratiwi, 2015: 35-36)

Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjelasan diatas dapat kita mambagi dampak ke dalam dua pengertian, yaitu: (Rizki Dwiarti Ratna Pratiwi, 2015: 36-37)

1. Pengertian Dampak Positif, adalah keinginan untuk membujuk, meyakini, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-jal yang baik. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan focus mental

seseorang yang negative. Bagi orang yang berfikir positif mengetahui bahwa dirinya sudah berfikir buruk ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mengikuti atau mendukung keinginan yang baik.

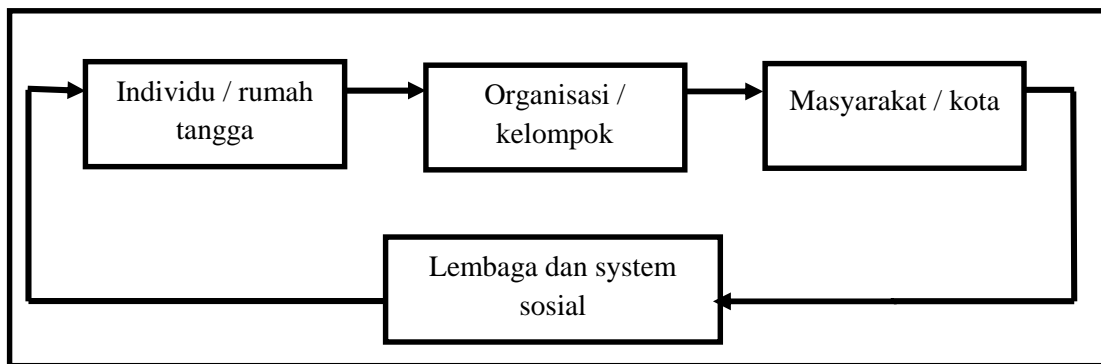
2. Pengertian Dampak Negatif, adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negative. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negative adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negative adalah keinginan untuk membujuk, meyakini, mengetahui atau memberi keinginannya yang buru dan menimbulkan akibat tertentu.

1.6.7 Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak merupakan evaluasi yang mencermati dampak tetap atau dampak jangka panjang. Evaluasi dampak memberikan erhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan. Dampak yang dimaksud adalah daak yang diharapkan serta dampak yang tidak diharapkan (Samudra Wibawa, 1994:29). Untuk mendeskrisikan dampak sosial dari kebijakan tersebut, dalam hal ini ada dua ketegori yang harus dianalisis yaitu unit pedampak dalam arti unit sosial yang terkena dampak dan aspek dampak dalam arti kehidupan yang terkena dampak. Dampak berbagai unit sosial bersifat agregatif dan resiprokal, tidak terpisah satu sama lain. Kebijakan

terhadap individu atau rumah tangga akan merembet pada kelompok, tapi sebaliknya dampak langsung mengenai suatu organisasi atau kelompok, tapi sebaliknya dampak yang langsung mengenai suatu organisasi atau kelompok dapat merembet pada individu dan rumah tangga. Jadi dampak kebijakan dapat berlangsung secara sekuensial maupun resiprokal, yang bersifat kumulatif.

Gambar 1.3 Resiprokal Dampak Kebijakan



Sumber: Samodra Wibawa (1999:53)

a. Dampak individu

Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek biologis/fisik, psikis, lingkungan idup, ekonomi dan social serta personal. Dampak biologis atau fisik biasanya menyangkut persoalan penyakit, cacat fisik dan kurang gizi. Dampak psikis dapat berpa alienasi, stress, depresi, kepercayaan diri, cinta dan emosi, dan lain-lain. Dampak lingkungan yang dimaksud adala keharusan untuk berpindahnya seseorang dari lingkungan tertentu karena adanya suatu proyek. Dampak ekonomis tidak saja menyentuh para pekerja melainkan juga

pemilik modal dan bahkan konsumen. Dampak social personal meliputi banyak dimensi atau aspek, dilihat darimana posisi individu tersebut.

b. Dampak organisasi

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya, sementara dampak tak langsung dapat berupa pengaruh terhadap karyawan.

c. Dampak terhadap masyarakat

Dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjukkan pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya.

d. Dampak terhadap lembaga dan system social

Perubahan yang terjadi di dalam sosial merupakan akibat dari banyak factor , bukan hanya merupakan akibat atau dampak dari sebuah kebijakan. Dalam menganalisis perubahan sosial selama ini dikenakan dua perspektif yang dominan, yakni fungsionalisme dan teori konflik. Perspektif fungsionalisme mengamati cara system sosial mengadaptasi perubahan dengan tetap menjaga strukturnya. Menurut pendekatan ini, seandainya sistem sosialnya sistem sosial ditentukan untuk melakukan perubahan struktural, nilai dasar dan organisasi masyarakatnya tetap akan dijaga. Sementara itu teori konflik melihat perubahan sistem sosial sebagai respon terhadap kelompok-kelompok penting dalam masyarakat. Jadi teori konflik banyak mengamati apa kebutuhan suatu sama lain.

Sistem dan lembaga yang ekis di suatu waktu mencerminkan cara konflik dikelola.

Evaluasi dampak terdapat beberapa unit sosial terkena dampak kebijakan (Wibawa, 1994: 53-59) antara lain: Penilaian kebijakan Negara banyak dilakukan untuk mengetahui dampak-dampak kebijakan. Oleh itu, ada beberapa dimensi yang digunakan dalam evaluasi kebijakan. Menurut Thomas R. Dye (1978:311-312).

1. Dampak kebijakan pada situasi target atau kelompok.
2. Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan atau kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan, kebijakan-kebijakan ini dinamakan eksternalisasi¹⁰ atau dampak yang datang.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan sekarang dan keadaan dimasa yang akan datang.
4. Evaluasi juga menyangkur sumber lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan publik.
5. Biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan.

Sedangkan menurut Langbein (Wibawa, 1993:38). Evaluasi dampak merupakan usaha yang dilakukan untuk mencermati dampak tetap atau dampak jangka panjang mempunyai empat dimensi, yaitu:

¹⁰ **Eksternalitas** adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. **Eksternalitas** sering disinggung ketika muncul dampak negatif dari suatu aktivitas ekonomi (<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksternalitas>)

1. Waktu

Dimensi ini penting karena kebijakan dapat memberikan dampak sekarang dan yang akan datang, semakin lama periode waktu semakin sulit mengukur dampak. Jika efek terhadap individu dipelajari terlalu lama akan kesulitan menjadi track individu dalam waktu yang sama. Semakin terlambat suatu evaluasi dilakukan akan semakin sulit mencari data dan menganalisis pengaruh program yang diamati.

2. Selisih antara dampak yang diinginkan

Evaluasi selain memperhatikan efektivitas tujuan perlu pula memperhatikan berbagai dampak yang tak diinginkan. Dampak yang hanya sebagian saja dari yang diharapkan dan juga dampak yang bertentangan dari yang diharapkan.

3. Tingkat agregasi dampak

Dampak juga bersifat agregatif, artinya bahwa dampak yang dirasakan secara individu akan dapat merembes pada perubahan masyarakat secara keseluruhan.

4. Jenis dampak

Ada empat jenis dampak suatu program, yakni:

- a.) Dampak pada kehidupan ekonomi: penghasilan, nilai tambah dan lain-lain.
- b.) Dampak pada proses pembuatan kebijakan: tindakan apa yang akan dilakukan pada kebijakan berikutnya.
- c.) Dampak pada sikap publik: didukung pada pemerintahan dan program.
- d.) Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok, masyarakat, yang bersifat non ekonomis.

1.6.8 Administrasi Pembangunan

Dalam konteksnya yang luas tersebut, pembangunan mempunyai beberapa pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda – beda pula. Beberapa pengertian pembangunan tersebut ialah: pembangunan adalah perubahan, pembangunan adalah pertumbuhan, pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan, pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi, pembangunan adalah cita – cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa (Afifuddin, S.Ag., M.Si,2012; 42-45).

Terdapat beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli mengenai administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berasal dari kata administrasi dan pembangunan, yang masing-masing memiliki makna yang berbeda. Secara umum, pengertian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan yang telah diutuskan dan diselenggarakan oleh dua atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik (Listyaningsih 2014; 17).

Definisi administrasi pembangunan menurut Siagian yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara

bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional, artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan.(Listyaningsih 2014;17)

Sedangkan menurut Tjokroamodjojo administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh Negara (pemerintah) untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa.(Listyaningsih 2014;)

George F. Gant dalam Sudriamunawar menjelaskan bahwa administrasi pembangunan sebagai penyempurna birokrasi (aparatur pemerintah) dalam menghadapi meningkatnya jumlah, jenis kompleksitas fungsi-fungsi pemerintahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Administrasi pembangunan adalah administrasi mengenai kebijaksanaan, program dan proyek untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan. Kemudian masih dari buku yang sama Mustopadidjaja dalam Sudriamunawar. Administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi Negara dilakukan sehingga dengan demikian sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.(Listyaningsih 2014; 17)

Definisi yang disampaikan oleh para ahli mengenai administrasi pembangunan, kemudian Siagian menyimpulkan bahwa terdapat tujuan ide pokok dalam administrasi pembangunan, antara lain:

1. Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari suatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang maupun jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna, pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara untuk berkemang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan eksistensinya.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas, diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih daripada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan system budaya yang kuat tetapi flaksibel.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan oerdefinisi bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan modernitas tersebut mencakup seluruh

segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengedepankan dalam bidang politik, ekonomi, social budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Keenam ide pokok di atas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga Negara yang bersangkutan semakin mantap keberadaannya ditengah-tengah Negara lain. (Listyaningsih 2014;18-19). Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ada sebuah Negara secara sadar dan terencana untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik (modern). Dari definisi administrasi pembangunan setidaknya mengandung 7 ide pokok yang bisa dijadikan *key word* yaitu proses, sadar, terencana, pertumbuhan dan perubahan, modernisasi, multidimensional, menuju kukuh dan mantap keberadaan sebuah Negara. (Listyaningsih 2014; 19)

1.6.9 PLTU

Arus listrik adalah elektron-elektron yang mengalir. Untuk mengalirkan arus listrik secara terus-menerus dalam suatu rangkaian tertutup diperlukan pembangkitan tenaga listrik. Pembangkitan tenaga listrik dilakukan dengan cara memutar generator sinkron sehingga didapatkan tenaga listrik arus bolak-balik tiga fasa. Tenaga mekanik yang dipakai memutar generator listrik didapat dari mesin penggerak generator listrik atau biasa disebut penggerak mula (*primover*) (mahasiswa.ung.ac.id). Mesin penggerak generator listrik yang banyak digunakan adalah mesin diesel, turbin uap, turbin air, dan turbin gas. Mesin penggerak generator melakukan konversi tenaga

primer menjadi tenaga mekanik penggerak generator. Proses pembangkitan tenaga listrik adalah proses konversi tenaga primer (bahan bakar atau potensi tenaga air) menjadi tenaga mekanik sebagai penggerak generator listrik dan selanjutnya generator listrik menghasilkan tenaga listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga dari uap air untuk menggerakkan turbin. Prinsip kerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap adalah memanaskan air, air berubah menjadi uap dan uap bertekanan akan memutar turbin. Turbin yang berputar akan menggerakkan generator. Generator yang diputar akan menghasilkan tenaga listrik. Di Indonesia, PLTU adalah selalu menggunakan batu bara sebagai sumber energi untuk memanaskan air.

PLTU merupakan jenis pembangkit yang menggunakan energi fosil yang tidak dapat diperbarui. PLTU merupakan pembangkit yang paling banyak digunakan di Indonesia. Pembangkit ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: Efisiensi Tinggi, cocok untuk memenuhi beban dasar, daya yang dihasilkan besar. Bisa menggunakan segala jenis bahan bakar (cair, padat, atau gas), biaya perawatan murah (penggantian suku cadang tidak terlalu sering), usia mesin lebih lama, tidak terlalu sering diadakan pemeriksaan bagian – bagian turbin. Kekurangan: Proses start lama, membutuhkan lahan yang luas, membutuhkan air pendingin yang cukup banyak sehingga biasanya ditempatkan didaerah yang dekat dengan sumber air yang melimpah, investasi awal mahal, proses pembangunan lama, emisi gas buang tidak ramah lingkungan (biasanya untuk bahan bakar batubara atau residu).

1.6.10 Masalah Kebijakan

Menurut Russell L. Ackoff (William Dunn 1999:209) keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi yang tepat terhadap masalah yang juga tepat. Kita lebih sering gagal karena kita memecahkan suatu masalah yang salah dari pada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat.

Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik. Perumusan masalah merupakan sistem petunjuk pokok atau mekanisme pendorong yang mempengaruhi keberhasilannya semua fase analisis kebijakan dewasa ini. Memahami masalah kebijakan adalah sangat penting, karena para analis kebijakan kelihatannya lebih sering gagal karena mereka memecahkan masalah yang salah daripada memperoleh solusi yang salah terhadap masalah yang tepat.

Saling ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan didalam satu bidang (misalnya, energy) kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah kebijakannya di dalam bidang ini (misalnya, pelayanan kesehatan dan pengangguran). Dalam kenyataannya masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; mereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang paling baik diterangkan sebagai *messes*, yaitu, suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen masyarakat yang berbeda.

Sistem masalah atau *messes* sulit atau bahkan tidak mungkin dipecahkan dengan menggunakan pendekatan analitis¹¹ kerana jarang masalah-masalah dapat didefinisikan dan dipecahkan secara sendiri-sendiri. Kadang-kadang merupakan hal yang mudah “untuk memecahkan sepuluh masalah yang terkait, daripada memecahkan satu masalah secara sendiri.” Sistem masalah yang saling tergantung mengharuskan suatu pendekatan *holistic*, suatu pendekatan yang memandang bagian-bagian sebagai tak terpisahkan dari keseluruhan sistem yang mengikat.

Subjektivitas dari masalah kebijakan. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat objektif (misalnya, populasi udara dapat didefinisikan sebagai tingkat gas dan partikel-partikel di dalam atmosfer) data yang sama mengenai populasi dapat diinterpretasikan secara berbeda. Masalah kebijakan “adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkaran tertentu; Masalah tersebut merupakan elemen dari suatu masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analisis. Dengan begitu, apa yang kita alami sesungguhnya adalah merupakan suatu masalah, bukan masalah itu sendiri seperti halnya atom atau sel, merupakan suatu konstruksi konseptual. Dalam analisis kebijakan merupakan hal yang sangat penting untuk tidak mengacuhkan antara situasi masalah dengan masalah kebijakan, karena masalah adalah barangabstrak yang timbul dengan mentransformasikan pengalaman ke dalam penilaian manusia.

¹¹ Pendekatan analitis yaitu, pendekatan yang memecahkan masalah ke dalam elemen-elemen atau bagian-bagian yang menyusunnya (William dunn, 1999:215)

Sifat buatan dari masalah. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia memuat penilaian mengenai keinginan hanya untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil/prodek penilaian subjektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi yang sah dari kondisi social ang objektif; dan karenanya, masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara social. Masalah tidak beada di luar individu dan kelompok-kelompok yang mendefinisikan, yag berarti bahwa tidak ada keadaan masyarakat yang “alamiah” di mana apa yang ada dalam masyarakat tersebut dengan sendirinya merupakan masalah kebijakan.

Dinamika masalah kebijakan. Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. “Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan; dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan. Solusi terhadap masalah dapat menjadi using meskipun barangkali masalah itu sendiri belum using.

1.7 Fenomena Penelitian

Maka gejala dampak yang diamati berdasarkan kriteria, yaitu :

1. Dampak kebijakan pada situasi target atau kelompok
 - Kepemilikan lahan di Desa Karanggeneng
 - Peralihan mata pencaharian.
 - Perubahan penghasilan masyarakat Desa Karanggeneng.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok sasaran atau tujuan kebijakan
 - Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa Karanggeneng.
 - Perubahan peluang kerja terutama masyarakat di Desa Karanggeneng.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang
 - Dampak dalam jangka pendek berupa jumlah warga yang bekerja di PLTU.
 - Lahan pengganti yang diberikan oleh BPI.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
 - Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) oleh pemerintah
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.
 - Konsinyasi atau ganti kerugian untuk lahan masyarakat dari pemerintah yang dititipkan ke pengadilan negeri

1.8 Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses dimana Penelitian tersebut bisa diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis karena Penelitian tersebut dapat membantu dalam mendapatkan suatu pemecahan masalah atau jawaban atas pernyataan-pernyataan yang diajukan. Setiap Penelitian dalam menentukan hasil harus didasarkan pada metode tertentu sehingga Penelitian dapat terarah pada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Desa Karanggeneng Kabupaten Batang tentang Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan PLTU terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang ini merupakan Penelitian kualitatif, maka Penelitian ini bertitik tolak pada paradigma fenomenologis yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi dan kondisi yang ada dilapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Ini digunakan untuk menunjang dalam penelitian, sehingga dari penelitian tersebut dihasilkan data berupa deskriptif, berupa kata maupun tidak tertulis dan para pelaku yang diamati, selain itu juga diharapkan dengan

penelitian ini dapat menemukan fenomena-fenomena dan makna-makna isu yang belum diketahui dilapangan.

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai dampak terhadap masyarakat atau mengenai bidang tertentu lainnya. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif semata-mata, sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

Meski pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya terhadap data-data yang bersifat kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif, namun bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif. Disamping penelitian kualitatif, penulis juga berupaya memperoleh data yang bersifat kuantitatif. Penelitian ini tidak hendak menilai hipotesis sesuai sifat penelitian kualitatif yang tidak bertujuan untuk menguji hipotesis. Yang akan banyak diteliti adalah fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian serta melakukan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati.

1.8.2 Situs Penelitian

Didalam penelitian ini, peneliti menentukan focus dan lokus penelitian. Fokus kajian penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan PLTU terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Karanggeneng di Kabupaten Batang.
- b) Sedangkan lokus dari penelitian ini adalah di Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Untuk memperjelas fenomena yang menunjukkan kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian informan ialah orang yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang penelitian kualitatif ini sehingga informan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moelong.2008: 9).

Jadi, dalam melakukan penelitian informan yang baik ialah informan yang dapat dipercaya, mempunyai pandangan atau wawasan luas mengenai kegiatan pembangunan PLTU Batang, atau terlibat langsung dengan fokus permasalahan yang akan diteliti, dengan kata lain informan yang dipilih adalah informan kunci.

Memperhatikan karakter informan tersebut, maka dalam penelitian disini jumlah informan yang dibutuhkan tidak bisa ditetapkan sejak awal dalam pembuatan rancangan penelitian. Sumber data adalah sejak awal dalam pembuatan rancangan penelitian informan. Disini dalam melakukan pemilihan informan tidak lepas dari sumber data, karena dalam mencapai tujuan penelitian diperlukan keterangan-keterangan yang selanjutnya disebut data.

Maka informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Karanggeneng, Masyarakat sekitar Desa Karanggeneng dan pekerja proyek PLTU

1.8.4 Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) sumber data utama dalam penelitian ialah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Pada bagian ini pula jenis data terbagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

- 1) Kata-kata dan tindakan orang-orang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video, pengambilan foto atau film.

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya. Dari ketiga kegiatan tersebut manakah yang lebih dominan satu situasi ke situasi lain.

- 2) Sumber tertulis

Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua jelas hal itu tidak bisa diabaikan dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah. Sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

- 3) Foto

Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri (Bodgan dan Biklem, 1982:102)

4) Data Statistik

Penelitian kualitatif juga sering menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu memberikan gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Misalnya statistik akan memberikan gambaran tentang kecenderungan bertambah atau berkurangnya tingkat kemiskinan desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman yang berkaitan dengan dampak pembangunan PLTU tersebut.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), antara lain :

- a. Data Primer, merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugas) dari sumber pertamanya, sumber pertama tersebut bisa berbentuk dari sumber individu atau perseorangan dari hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pedoman pada interview guide yang sudah disusun. Data primer diperoleh dari para responden yang meliputi pencarian data

langsung pada pihak interen PLTU, pemerintah dan keompok masyarakat sekitar area pembangunan.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokuman, data sekunder dipergunakan unutm memberikan gambaran tambahan maupun gambaran perlengkap terhadap keadaan umum objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, arsip, laporan hasil penelitian, monografi, serta bentuk-bentuk lain yang dapat memberikan informasi dalam kaitannya penelitian ini.

1.8.6 TeknikPengumpulan Data

Untuk memperoleh keterangan atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, maka dibutuhkan cara-cara agar keterangan atau data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun teknik-teknik penumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain melalui dokumentasi, wawancara dan pengamatan langsung.

- a. Telaah Dokumen / Pustaka

Dokemen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan unutm melengkapi pengetahuan yng mendalam tentang suatu kasus yang berguna unutm melengkapi data memperkuat yang bisa ditarik dari penelitian ini. Dokumen yang dimanfaatkan dalam penelitian ini bisa berasal dari mana saja, sepanjang behubungan dengan masalah yang diteliti, misalnya dokumen-dokumen statistic,

foto-foto, dokumen berupa arsip dan laporan pada lembaga pemerintah yang terkait.

b. Wawancara mendalam (Interview Guide)

Teknik wawancara mendalam akan digunakan dalam penelitian ini, terutama untuk mengkonstruksi kegiatan dan kejadian disekitar kebijakan serta untuk mengklarifikasi dan memperluas data atau informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan petunjuk umum wawancara yang hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isinya. Hal ini dilakukan agar pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan dapat tetap terjaga dan yang direncanakan dapat tercapai. Adapun yang menjadi sasaran wawancara adalah pemerintah Desa, masyarakat sekitar area pembangunan PLTU, dan pekerja PLTU.

c. Pengamatan Langsung atau Observasi

Teknik pengamatan langsung digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang peran masing-masing sehubungan dengan pembangunan PLTU tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan suatu penjelasan atau keterangan yang dipergunakan untuk melengkapi data yang diperoleh serta memberikan penjelasan dan gambaran menyeluruh tentang faktor eksternal dalam kebijakan yang diambil beserta pengaruhnya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan, yaitu :

a) Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan,, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian dilapangan, yaitu dengan cara mnilai hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian terkait masalah evaluasi kinerja. Data-data yang telah direduksi ini memberikan gambaran yang tajam mengenai hasil dari pengamatan dan mempermudah enelitian jika itu diperlukan.

b) Penyajian Data

Data disajikan serta tertulis berdasarkan kasus-kasus actual yang saling berkaitan. Tampilan data digunakan untk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

c) Penarikan Kesimpulan

Yaitu langkah terakir dalam kegiatan analisis kalitatif. Penarikan kesimpulan trgantung kumpulan catatan tentang data-data tersebut.

1.8.8 Kualitas Data

a) Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan.

Keabsahan data yang memanfaatkan data yang lain untk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang tersebut. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data

diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam teori, data, dan analisis (Triangulasi). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moeleong, 2008: 330). Dalam penelitian kualitatif, Triangulasi dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi,
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moeleong, 2008 :331)

b) Kecukupan referensi

Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan bahan-bahan yang tercetak atau terekam yang digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu-waktu diadakan analisis dan penafsiran data. Selain itu juga menggunakan informasi tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pengujian itu.